



BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Bima

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, untuk itu perlu ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Bima di bagi dalam 3 (tiga) urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Pelayanan Dasar, Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan.

4.1.1. Identifikasi Permasalahahan Dalam Menentukan Program Pembangunan Daerah

Untuk merumuskan permasalahan pembangunan daerah dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka perlu melihat sasaran pokok sebagaimana yang diamanatkan oleh RPJPD dan dijabarkan dengan baik kedalam RPJMD. Identifikasi permasalahan sesuai dengan sasaran pokok RPJPD adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Identifikasi Permasalahan Dalam Menentukan Program Pembangunan Daerah

NO	SASARAN POKOK RPJPD	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4
AGENDA I : Perwujudan Masyarakat Sejahtera dan Mandiri			
1.	Terwujudnya Penanggulangan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none">) Masih cukup tingginya angka kemiskinan) Belum optimalnya Penanggulangan Masalah Kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none">) Peningkatan kemampuan SDM dan Permodalan) Terintegrasinya program pembangunan daerah
2.	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah akibat rendahnya pendapatan per kapita	<ul style="list-style-type: none">) Peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah) Pemberdayaan masyarakat
3.	Peningkatan Kualitas Masyarakat	Masih rendahnya angka IPM	Peningkatan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat

NO	SASARAN POKOK RPJPD	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4
4.	Pembangunan Ketenaga Kerjaan	<ul style="list-style-type: none">) Kualitas tenaga kerja pada berbagai aspek ketenagakerjaan masih rendah) Masih banyaknya pengangguran 	<ul style="list-style-type: none">) Fasilitasi mitra kerja untuk wirausaha baru) Peningkatan kualitas tenaga kerja
5.	Pembangunan Pedesaan	Masih adanya desa-desa yang belum terjangkau layanan listrik dan air bersih	<ul style="list-style-type: none">) Fasilitasi mitra untuk pembentukan PLTS, dan PLTMH) Peningkatan program sumur bor dalam dan optimalisasi pemanfaatan sumber air permukaan
6.	Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none">) Meningkatnya berbagai penyakit sosial sehingga menghambat proses transformasi social) Transformasi budaya luar yang bertentangan dengan nilai budaya lokal semakin mudah terjadi) Masih adanya kasus kekerasan anak dan perempuan 	<ul style="list-style-type: none">) Penanganan dan pemberantasan penyakit sosial masyarakat) Mengembangkan pendidikan dengan muatan budaya lokal) Kesadaran hukum
7.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur`	Masih belum tersedianya infrastruktur pemerintahan Masih	Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan
8.	Peningkatan Peran serta Perempuan dalam Pembangunan Daerah	Belum optimalnya peran serta perempuan dalam pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none">) Fasilitasi program kesetaraan gender) Penanganan kasus KDRT
9.	Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none">) Penataan administrasi kependudukan masih belum efektif) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam untuk ber KB) Belum optimalnya pembinaan olahraga dan pemuda 	<ul style="list-style-type: none">) Peningkatan pelayanan akta kependudukan) Sosialisasi KB) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan pembinaan atlet) Mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan
10.	Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya	Masih kurangnya pemahaman nilai-nilai agama dan nilai sosial budaya daerah di tengah masyarakat	<ul style="list-style-type: none">) Peningkatan pendidikan dan pengamalan agama) Peningkatan peran tokoh agama dan masyarakat

NO	SASARAN POKOK RPJPD	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4
AGENDA II : Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama			
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui peningkatan kualitas guru-guru agama yang didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai	<ul style="list-style-type: none">) Kurang optimalnya kualitas Guru dan Da'i) Kurangnya fasilitas pendidikan Agama 	<ul style="list-style-type: none">) Peningkatan kualitas guru-guru agama dan dai) Pembangunan fasilitas pendidikan agama
2.	Meningkatkan akses untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dg dukungan sarana dan prasarana peribadatan yang memadai	Belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana ibadah yang memadai	<ul style="list-style-type: none">) Pembangunan sarana dan prasarana ibadah yang memadai
3.	Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup umat beragama baik intern antar umat beragama maupun antara umat beragama dan pemerintah		<ul style="list-style-type: none">) Meningkatkan toleransi antar umat beragama
4.	Meningkatkan penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai	Kualitas sarana dan prasarana ibadah yang kurang terawat dan terjaga	Revitalisasi sarana dan parasarana ibadah
5.	Meningkatkan peran dan fungsi TOGA, lembaga keagamaan dlm menunjang terselenggaranya kehidupan beragama yang berkualitas	Menurunnya peran dan nilai ketokohan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Optimalisasi peran dan fungsi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan Lembaga Keagamaan
6.	Memantapkan forum kerjasama sosial kemasyarakatan bidang keagamaan		Penguatan forum kerjasama sosial kemasyarakatan
AGENDA III : Terwujudnya Pemerintahan yang baik			
1.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan guna mewujudkan good governance	Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan masih terbatas	<ul style="list-style-type: none">) Akses layanan
2.	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik,	<ul style="list-style-type: none">) Masih rendahnya kualitas SDM aparatur) Belum maksimalnya pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none">) Diklat aparatur) Perbaikan sistem pelayanan publik

NO	SASARAN POKOK RPJPD	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4
	bersih, berwibawa, bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan daerah		
3.	Terciptanya supremasi hukum dan meningkatkan kapasitas kelembagaan hukum daerah dalam pengawasan pembangunan	Masih banyaknya masyarakat yang belum paham hukum) Sosialisasi
4.	Penataan kelembagaan pemerintah daerah) Masih belum optimalnya sistem pelayanan satu atap dalam pelayanan publik) Belum optimalnya langkah strategi kerjasama dalam penyelesaian aset dengan Kota Bima) Optimalisasi Sistem Pelayanan Satu Atap dalam pelayanan publik dan penyelesaian aset dengan Pemerintah Kota Bima

AGENDA IV : Terwujudnya Pertanian yang berkelanjutan

1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian	Belum adanya upaya yang terarah dan berbasis teknologi untuk mendorong transformasi system usaha pertanian) Diversifikasi Produk pertanian) Intensifikasi dan mekanisasi pertanian) Pengembangan teknologi tepat guna
2.	Peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian dg pengembangan industri pengolahan hasil pertanian	Belum adanya industri pengolahan hasil pertanian	Pengembangan indutri pengolahan
3.	Meningkatkan akses masyarakat tani terhadap sumber-sumber permodalan	Masih rendahnya akses masyarakat terhadap akses permodalan	Optimaliasasi Peran Lembaga Keuangan
4.	Meningkatkan akses masyarakat tani terhadap pasar domestik, regional, nasional maupun internasional) Sulitnya pemasaran hasil pertanian) Kurangnya informasi pasar) Optimaliasasi koordinasi menuju peningkatan peran Swasta) Optimaliasasi Penyediaan informasi

AGENDA V : Terciptanya Pembangunan berwawasan lingkungan

1.	Peningkatan sumber daya manusia/kependudukan) Masih adanya penduduk yang buta aksara) Penataan administrasi kependudukan yang belum efektif) Akses layanan pendidikan dan ketrampilan) Peningkatan layanan akta kependudukan
2.	Peningkatan sumber daya sosial kelembagaan) Masih rendahnya kualitas sumber daya sosial kelembagaan) Diklat dan studi Banding) Peningkatan kerjasama/ kemitraan usaha

NO	SASARAN POKOK RPJPD	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4
3.	Peningkatan sumber daya alam/lingkungan	<ul style="list-style-type: none">) Belum optimalnya pengelolaan SDA) Masih banyaknya lahan kering dan kritis) Masih sering terjadi peladangan liar dan kerusakan hutan 	<ul style="list-style-type: none">) Optimalisasi penggunaan SDA secara berkelanjutan) Penghijauan) Optimalisasi penggunaan SDA secara berkelanjutan) Penghijauan) Kesadaran masyarakat dan penegakan hukum
4.	Peningkatan sumber daya buatan/ekonomi		<ul style="list-style-type: none">) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung) Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup

4.1.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

A. Identifikasi Permasalahan Urusan Pemerintahan Umum

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
 -) Kemampuan keuangan daerah yang masih rendah;
 -) Sarana-prasarana pemerintahan yang masih kurang representative;
 -) Manajemen pengelolaan aset yang belum maksimal;
 -) Masih rendahnya kompetensi dan integritas kerja dan kesejahteraan ASN;
 -) Masih tingginya jumlah pegawai honorer / sukarela;
 -) Potensi konflik / instabilitas daerah yang masih rawan;
 -) Sudah berkurangnya solidaritas sosial dan peranan sesepuh/tokoh lokal;
 -) Kecepatan respon pemerintah dalam pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2. Perencanaan Pembangunan
 -) Perencanaan partisipatif yang belum terintegrasi dengan perencanaan teknokrasi;
 -) Sistem pendataan pembangunan yang belum real time dan manual (belum sistem elektronik);

-) Masih adanya kesenjangan antara “Programing “ dan “Budgeting” serta intervensi dalam penyusunan perencanaan;
-) Belum maksimalnya penerapan kebijakan strategis daerah untuk menggerakkan potensi unggulan dan perimbangan antar wilayah;
-) Masih lemahnya kapasitas perencanaan ditingkat desa dan kecamatan.

B. Identifikasi Permasalahan urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

-) Masih terdapat masyarakat yang buta huruf, Angka partisipasi kasar SMP/ MTsN/ Paket B serta Angka partisipasi kasar SMA/ MAN/ SMK/ Paket C masih belum sampai 100%;
-) Pendistribusian guru masih belum proposional pada setiap kecamatan / sekolah dan Masih rendahnya kompetensi dan profesionalitas pengajar;
-) Perlunya peningkatan nilai- nilai Moral, Akhlak dan Integritas dalam pelaksanaan pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

-) Masih tingginya kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten Bima;
-) Belum tercapainya angka harapan hidup yang sesuai standar nasional;
-) Masih tingginya angka prevalensi terjadinya penyakit menular DBD, TBC/ BTA, Malaria dan Kusta;
-) Masih terbatasnya tenaga medis/dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya serta kelengkapan sarana-prasarana dan obat/perbekalan kesehatan;
-) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin masih rendah;
-) Belum optimalnya pelayanan Desa Siaga Aktif.

3. Urusan Pekerjaan Umum

-) Masih belum maksimalnya pengelolaan sistem irigasi dan perlu adanya penambahan sarana irigasi strategis bagi wilayah-wilayah tadah hujan;
-) Masih banyaknya jalan dan jembatan yang kondisinya belum memadai serta minimnya jalan perekonomian dan pengembangan kawasan strategis;

-) Penanganan air bersih, sanitasi dan persampahan yang belum maksimal;
 -) Dokumen perencanaan dan masterplan sarana dan prasarana strategis yang masih minim.
- 4. Penataan Ruang dan Pertanahan
 -) Dokumen dan kegiatan pengendalian penataan ruang yang belum optimal serta program penanganan wilayah ibukota yang mendesak untuk disusun;
 -) Perlu adanya pedoman penataan ruang publik, serta belum berjalannya fungsi pengawasan/ pengendalian penataan ruang;
 -) Masih adanya sengketa hak milik tanah dan belum adanya peta batas-batas wilayah desa dan kecamatan.
- 5. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 -) Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah dan menempati rumah tidak layak huni;
 -) Prasarana dan sarana Umum permukiman yang masih minim dan belum tertata;
 -) Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh.
- 6. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 -) Masih sering terjadinya perkelahian antar kampung;
 -) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum dan pendidikan nilai-nilai moral dan ahlak pada masyarakat;
 -) Belum optimalnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- 7. Urusan Sosial
 -) Data dan sasaran pelaksanaan pelayanan sosial dasar masih kurang tepat;
 -) Penanganan sosial penduduk rawan sosial belum maksimal.

C. Identifikasi Permasalahan urusan Pemerintahan Bidang Non Pelayanan Dasar

1. Ketenaga Kerjaan
 -) Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi dan terbatasnya ketrampilan tenaga kerja;
 -) Upaya penciptaan lapangan kerja dan pembinaan kewirausahaan yang belum optimal;

-) Belum akuratnya data base ketenagakerjaan dan kurangnya perlindungan pada tenaga kerja.
- 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 -) Adanya peningkatan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
 -) Masih kurang efektifnya perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dan keberpihakan gender dan berkebutuhan khusus dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik.
- 3. Urusan Ketahanan Pangan
 -) Belum tersedianya regulasi daerah sebagai pedoman tata laksana keamanan, mutu dan gizi pangan di daerah;
 -) Masih tingginya pemanfaatan beras sebagai pangan utama dan perlunya keanekaragaman konsumsi pangan lokal.
 -) Belum optimalnya pemantauan distribusi harga dan akses masyarakat terhadap pangan
 -) Masih adanya daerah rawan pangan
- 4. Lingkungan Hidup
 -) Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 -) Masih lemahnya pengendalian dan komitmen para pemangku kepentingan dalam pelestarian lingkungan;
 -) Makin berkurangnya jumlah titik mata air.
- 5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 -) Rendahnya kualitas SDM dalam pelayanan dan pendataan bidang kependudukan dan catatan sipil;
 -) Belum sinkronnya data dari Kependudukan dari Capil dengan institusi lain;
 -) Masih kurangnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan warga miskin.
- 6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 -) Menurunnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;
 -) Masih kurangnya kualitas SDM aparatur di desa;

-) Perlunya peningkatan kegiatan pemberdayaan dan penyediaan lapangan kerja di desa
- 7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 -) Kurang optimalnya pengendalian penduduk dan KB;
 -) Masih rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan pernikahan di bawah umur;
 -) Masih kurangnya SDM penyuluh kependudukan dan KB;
- 8. Perhubungan
 -) Minimnya sarana prasarana transportasi pada kawasan terisolir, potensial dan strategis;
 -) Masih terbatasnya armada transportasi umum dan milik pemda yang menjangkau semua wilayah;
 -) Belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur sistem Tataran Transportasi Lokal (Tatralok).
- 9. Komunikasi dan Informatika
 -) Kurangnya akses informasi dan Telekomunikasi pada desa-desa terpencil;
 -) Belum terbangunnya sistem e- government yang mandiri;
 -) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kegiatan masyarakat, swasta, dan birokrasi.
- 10. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 -) Belum optimalnya metode pembinaan Koperasi dan UMKM;
 -) Kurangnya akses terhadap pendanaan bagi Koperasi dan UMKM;
 -) Terbatasnya pembinaan kewirausahaan dan manajemen Koperasi dan UMKM.
- 11. Penanaman Modal
 -) Kurangnya koordinasi dan pendataan potensi investasi;
 -) Belum adanya regulasi daerah tentang penanaman modal;
 -) Minimnya infrastruktur pendukung, jaminan keamanan dan kemudahan berinvestasi.

12. Kepemudaan dan Olahraga

-) Kurangnya pembinaan terhadap olahragawan dan kepemudaan;
-) Kurangnya penghargaan terhadap olahragawan dan kepemudaan yang berprestasi;
-) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif;
-) Kurangnya ruang terbuka publik untuk kegiatan olah raga dan kepemudanaan pada kawasan pedesaan.

13. Statistik dan Kearsipan

-) Belum terbangunnya sisitem kearsipan secara elektronik;
-) Belum optimalnya penataan dan sarana data statistik, kearsipan daerah dan kebendaan;
-) Masih terbatasnya SDM di bidang statistik dan kearsipan.

14. Kebudayaan

-) Rendahnya upaya inventarisasi dan pelestarian budaya lokal;
-) Kurangnya promosi budaya dan penyelenggraan festival budaya;
-) Belum adanya pendantaan dan dokumen perencanaan pariwisata daerah.

15. Perpustakaan

-) Masih kurangnya minat baca masyarakat;
-) Masih kurangnya variasi bahan bacaan dan minimnya sarana perpustakaan;
-) Masih minimnya SDM pengelola perpustakaan.

D. Identifikasi Permasalahan Urusan Pilihan

1. Pertanian

-) Belum optimalnya penerapan teknologi , budidaya pertanian berkelanjutan dan penerapan pola agribisnis;
-) Masih kurang optimalnya fungsi kelembagaan tani dan penerapan pola tanam terpadu;
-) Belum terpenuhinya sarana produksi menurut 6 (enam) tepat :
1) jumlah. 2) tempat. 3) jenis. 4) harga. 5) mutu dan 6) waktu.

2. Peternakan

-) Masih rendahnya kualitas dan harga ternak lokal
-) Masih rendahnya penerapan budidaya ternak berkelanjutan;

-) Berkurangnya area pelepasan ternak dan belum adanya Perda pelepasan ternak;
 -) Belum optimalnya pendataan ternak serta penerapan sanksi.
3. Kehutanan
-) Belum optimalnya kegiatan rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 -) Belum maksimalnya penanganan Lahan Kritis dan Lahan Tidak produktif;
 -) Masih terjadinya Kasus perambahan hutan dan ilegal logging;
 -) Masih rendahnya pengawasan dan pembinaan kehutanan.
4. Kelautan dan Perikanan
-) Masih minimnya sarana dan prasarana dan penggunaan teknologi perikanan budidaya/tangkap;
 -) Masih kurangnya pengawasan atas eksploitasi hasil perikanan tangkap (bom ikan, illegal fishing);
 -) Belum terintegrasinya sektor perikanan / kelautan dengan sektor lain (misal sektor pariwisata, dll).
5. Pariwisata
-) Belum adanya Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda);
 -) Masih kurangnya Pengembangan dan pengelolaan terhadap destinasi Pariwisata (wisata budaya, wisata alam, wisata Buatan);
 -) Masih lemahnya promosi dan kegiatan investasi srta kurangnya dukungan lintas sektor pengembangan pariwisata;
 -) Adanya tumpang tindih pemanfaatan ruang dengan sektor lain.
6. Pertambangan
-) Maraknya Penambangan Tanpa Izin (PETI) dan penggunaan air tanah; serta lemahnya Pengawasan;
 -) Tingginya resistensi masyarakat terhadap usaha di bidang pertambangan;
 -) Masih adanya lokasi kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan RTRW.
7. Energi dan Sumberdaya Mineral
-) Rendahnya penguasaan teknologi dan pengembangan energi baru terbarukan;

-) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap efisiensi pemanfaatan sumber energi.
- 8. Perindustrian
 -) Lemahnya daya saing produk IKM dan kurangnya inovasi dan diversifikasi produk;
 -) Masih rendahnya pengetahuan dan penerapan teknologi serta keterampilan pelaku usaha/ IKM;
 -) Kurangnya akses industri kecil dan menengah terhadap permodalan dan penguasaan pasar.
- 9. Perdagangan
 -) Belum optimalnya kemitraan usaha (usaha besar, menengah dan kecil);
 -) Belum tertatanya jaringan pasar mulai dari Desa sampai Kabupaten;
 -) Masih terbatasnya komoditi lokal yang menjadi branding daerah.

4.1.3. Penelaahan RPJMN dan RPJMD Daerah Lainnya

Agar perencanaan pembangunan daerah mengadopsi atau selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan propinsi, perlu dilakukan penyelarasan terhadap kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang akan mempengaruhi pembangunan daerah. Disamping itu, agar perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan program kewilayahan daerah lain dapat selaras maka perlu dilakukan penelaah terhadap RPJMD daerah lain.

A. Penelaahan RPJMN dan RPJMD Propinsi

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintahan yang berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan dimaksudkan sebagai sumber untuk mengidentifikasi isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Bima. Adapun telaahannya dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan
RPJMN, RPJMD Provinsi NTB dan RPJMD Kabupaten Bima

RPJMN	RPJMD KAB. BIMA	RPJMD PROPINSI NTB
VISI (2015-2019)	VISI (2016-2021)	VISI (2013-2018)
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bima yang Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal (RAMAH)	Mewujudkan masyarakat NTB Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera

MISI RPJMN	MISI RPJMD KAB. BIMA	MISI RPJMD NTB
1. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	1. Meningkatkan Masyarakat Yang Berkualitas Melalui Penerapan Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat	1. Mempercepat Perwujudan Masyarakat yang Berkarakter; 2. Mengembangkan Budaya dan Kearifan Lokal
2. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang bkemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesian sebagai Negara kepulauan	2. Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Tertib, dan Nyaman Dengan Mengedepankan Penegakan Supermasi Hukum	3. Mengembangkan Budaya dan Kearifan Lokal 4. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim		
4. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokrasi berlandaskan negara hulu	3. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat, dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran didukung tersedianya sarana dan prasarana berbasis tata ruang	5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah

MISI RPJMN	MISI RPJMD KAB. BIMA	MISI RPJMD NTB
<p>5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing</p> <p>6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.</p>	<p>dan pengelolaan lingkungan hidup.;</p>	<p>6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang.</p> <p>7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan</p>
<p>7. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokrasi berlandaskan negara hulu</p>	<p>4. Meningkatkan kemampuan, kejujuran aparatur pemerintah dengan mengedepankan rasa tanggungjawab melalui tata kelola pemerintahan yang baik</p>	<p>8. Mempercepat Perwujudan Masyarakat yang Berkarakter;</p> <p>9. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan.</p>
<p>10. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera</p>	<p>5. Membangun masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing</p>	<p>10. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing</p>

Prioritas RPJMN :	Prioritas RPJMD Kab. Bima :	Prioritas RPJMD NTB :
1. Pendidikan;	1. Pendidikan	1. Pendidikan
2. Kesehatan;	2. Kesehatan	2. Kesehatan
3. Infrastruktur;	3. Infrastruktur, penataan ruang, pariwisata dan konektivitas wilayah	3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Energi;		4. Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
5. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik;		
6. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik;	4. Keamanan, ketertiban dan supremasi hukum	5. Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan

Prioritas RPJMN :	Prioritas RPJMD Kab. Bima :	Prioritas RPJMD NTB :
7. Ketahanan pangan; 8. Iklim investasi dan usaha;	5. Ekonomi kreatif, agroindustri dan ketahanan pangan	6. Wirausaha dan Iklim Investasi 7. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 8. Agroindustri dan Ketahanan Pangan
9. Penanggulangan kemiskinan;	6. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	9. Kesejahteraan Sosial
10. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.	7. Pengamalan agama, sosial dan budaya	10. Budipekerti Luhur
11. Lingkungan hidup dan bencana;	8. Lingkungan hidup dan Penanggulangan bencana	11. Lingkungan Hidup, Perubahan iklim dan Bencana Alam
12. Reformasi birokrasi dan tata kelola;	9. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	12. Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan

B. Penelaahan RPJMD Daerah Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan RPJMD daerah lain agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitarnya, atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penelaahan terhadap RPJMD daerah lain dipandang perlu untuk mendapatkan gambaran kondisi, keterkaitan dan keselarasan antarkebijakan terutama dengan daerah dalam satu provinsi. Keterkaitan prioritas pembangunan antara Kabupaten Bima dengan Kota Bima dan Kabupaten Dompu, disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan
RPJMN, RPJMD Propinsi NTB dan RPJMD Kabupaten Bima

PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH		
KABUPATEN BIMA	KOTA BIMA	KABUPATEN DOMPU
1. Pendidikan	1. Pendidikan	1. Peningkatan layanan pendidikan masyarakat
2. Kesehatan	2. Kesehatan	2. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat
3. Infrastruktur, penataan ruang, pariwisata dan konektivitas wilayah	3. Infrastruktur	3. Pengembangan pariwisata 4. Pembangunan dan pemantapan infrastruktur strategis 5. Peningkatan cakupan layanan air bersih 6. Penataan fasilitas perkotaan
4. Keamanan, ketertiban dan supremasi hukum		7. Peningkatan kualitas produk hukum daerah, koordinasi penegakan hukum dan kesadaran hukum
5. Ekonomi kreatif, agroindustri dan ketahanan pangan	4. Pembangunan Ekonomi Wilayah	8. Pengembangan agribisnis 9. PIJAR
6. Pengamalan agama, sosial dan budaya	5. Keagamaan	10. Pengembangan dan peningkatan kualitas pengamalan agama; 11. Pengembangan seni budaya lokal
7. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	6. Pembangunan Ekonomi Wilayah	12. Peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja 13. Penguatan kapasitas fiskal
8. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	7. Pembangunan Kelembagaan	14. Pengarusutamaan gender

4.2 Isu - Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bima

Analisa isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan berpengaruh pada pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

Isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Bima tahun 2016 – 2021 disusun dengan melihat dari fakta-fakta permasalahan pembangunan maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipandang mendasar dalam pelaksanaan pembangunan 2016-2021. Adapun identifikasi isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Bima tahun 2016 -2021 dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Identifikasi Isu-isu Strategis Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2021

No	URUSAN	PERMASALAHAN	ISU
1	2	3	4
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
1.	Pendikan	Masih terdapat masyarakat yang buta huruf, Angka partisipasi kasar belum sampai 100%	Akses dan mutu Pelayanan pendidikan yang belum optimal
2.	Kesehatan	Tingkat kesehatan masyarakat yang masih membutuhkan penanganan terintegrasi	Akses dan mutu Pelayanan kesehatan yang belum optimal
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingginya eksploitasi sumberdaya alam melampui batas	Kurang optimalnya penegakan aturan lingkungan dan pengendalian pemanfaatan ruang
4.	Sosial	Kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat dan kerentanan terhadap bencana alam	Tingginya potensi konflik horisontal serta rendahnya daya dukung lingkungan
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
1.	Tenaga Kerja	Masih tingginya angka pengangguran	Terbatasnya lapangan kerja
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Masih terdapatnya pekerja anak, maraknya kasus napza dan kenakalan remaja, kekerasan domestik serta beban ganda dalam keluarga	Akses terhadap perempuan terhadap kesempatan pendidikan dan kerja formal, ruang kreatifitas sosial, penurunan angka pekerja anak, pemberantasan napza dan perlindungan keluarga
3.	Lingkungan Hidup	Tingginya tingkat kerusakan lingkungan	Kurang optimalnya penegakan aturan lingkungan

No	URUSAN	PERMASALAHAN	ISU
4.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kurangnya rendahnya akses permodalan ekonomi kreatif	Iklm investasi yang kurannng mendukung, akses permodalan terbatas serta rendahnya dukungan sarana prasarana daerah
5.	Kepemudaan dan Olahraga	Globalisasi dan Teknologi Informasi membawa dampak negatif terhadap pengamalan agama, gaya hidup, Integritas dan orientasi aparatur dan masyarakat	Adanya perubahan sikap luhur dan Penurunan Pelaksanaan nilai-nilai agama dan normal sosial aparat dan masyarakat
6.	Kebudayaan		
Urusan Pemerintahan Pilihan			
1.	Kelautan dan Perikanan	Masih tingginya angka kemiskinan	Terbatasnya jaminan pasar terhadap produk
2.	Pertanian		
3.	Kehutanan	Eksplorasi sumberdaya alam melampui batas	Kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang
4.	Energi dan Sumberdaya Mineral		
5.	Perdagangan	Kurangnya variatifnya peluang investasi dan rendahnya akses permodalan ekonomi kreatif	Iklm investasi yang kurannng mendukung, akses permodalan terbatas serta rendahnya dukungan sarana prasarana daerah
6.	Perindustrian		
Urusan Pemerintahan Umum			
1.	Kepegawaian dan Diklat	Kurangnya kesadaran aparatur sebagai pelayan masyarakat	Kualitas SDM yang masih rendah serta tatakelola birokrasi yang masih menempatkan aparatur sebagai sentral bukan sebagai pelayan
2.	Pemerintahan Umum		
3.	Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Globalisasi dan Teknologi Informasi membawa dampak negatif terhadap pengamalan agama, gaya hidup, Integritas dan orientasi aparatur dan masyarakat	Adanya perubahan sikap luhur dan Penurunan Pelaksanaan nilai-nilai agama dan normal sosial aparat dan masyarakat

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 2016-2021 mendatang. Berdasarkan analisa potensi dan permasalahan yang ada, pemerintah Kabupaten Bima menetapkan isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama, stabilitas daerah (keamanan, ketertiban dan politik), kesadaran dan penegakan hukum.

Untuk menciptakan kondusifitas penyelenggraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik maka harus didukung oleh kondisi stabilitas daerah yang baik melalui:

-) Implementasi pendidikan keagamaan untuk meningkatkan ahlak dan nilai moral masyarakat
 -) Peningkatan Keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pendekatan swakarsa
 -) Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum
2. Akses dan layanan pendidikan
- Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk itu pendidikan perlu mendapat perhatian agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:
-) Keterjangkauan: akses dan pembiayaan
 -) Kualitas pendidikan; SDM pendidik, materi dan metode pembelajaran, sarana dan prasarana
 -) Tata kelola lembaga pelayanan pendidikan
3. Akses dan layanan kesehatan
- Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia sehat dan handal dalam pembangunan. Untuk itu akses pelayanan kesehatan ini dipandang perlu karna menyangkut keberlanjutan hidup masyarakat dan diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mendapat pelayanan kesehatan Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:
-) Kualitas pelayanan kesehatan; Tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan
 -) Jaminan dan keterjangkauan akses pelayanan kesehatan: pelayanan BPJS
 -) Penyehatan lingkungan masih menjadi isu yang penting untuk diperhatikan terutama berkaitan dengan peningkatan kesadaran masyarakat.
4. Infrastruktur wilayah
- Infrastruktur merupakan aspek utama dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, juga merupakan komponen dasar pertumbuhan ekonomi daerah. Penyediaan infrastruktur yang memadai sangat penting dalam mendorong pengembangan pembangunan daerah, mendukung akses pelayanan masyarakat dan percepatan pertumbuhan daerah tertinggal.

5. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan pangan diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan dan politik. Dalam mewujudkan ketahanan pangan yang perlu diperhatikan adalah :

-) Akses dan distribusi pangan
-) Keragaman/disversifikasi pangan
-) Mutu dan keamanan pangan
-) Penguatan kelembagaan dan Stabilitas harga pangan

6. Kemiskinan dan pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran merupakan isu yang paling krusial baik nasional, regional maupun lokal. Kemiskinan dan pengangguran sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemampuan untuk mendapatkan pelayanan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, penerangan, kesempatan kerja dan keamanan. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidak mampuan ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar, perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran maka hal-hal yang perlu dilakukan yaitu :

-) Pemberdayaan masyarakat masyarakat untuk pengetasan kemiskinan
-) Terintegrasinya program pembangunan pro rakyat miskin
-) Akses terhadap sumberdaya: modal dll
-) Peningkatan kualitas tenaga kerja, Kesempatan kerja dan lapangan kerja,

7. Kemandirian perekonomian daerah

Perekonomian daerah secara makro meskipun telah menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahunnya, namun peningkatan nilai tambah hasil produksi usaha masyarakat belum memberikan peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan semua sector pembangunan dan peran sector strategis akan sangat memberikan kontribusi yang tinggi dalam menggerakkan sektor lainnya.

Untuk mendukung kemandirian perekonomian daerah ini maka perlu didukung oleh:

-) Peningkatan produksi unggulan dan pengembangan industri kecil dan menengah.
 -) Penciptaan sentra-sentra ekonomi dan Pembangunan kawasan agribisnis
 -) Stabilitas wilayah: keamanan dan ketertiban, politik
8. Penataan ruang, perumahan dan pemukiman
- Dengan ditetapkan Perda Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima Tahun 2011 – 2031 memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan kebutuhan dan kaidah-kaidah yang terkandung didalamnya. Perumahan adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat dan salah satu kriteria dalam pengurangan kemiskinan,
-) Penerapan RTRW dalam perencanaan dan pengendalian ruang
 -) Rumah tidak layak huni
 -) Pemenuhan sarana dan prasarana utilitas
 -) Penataan pemukiman kumuh
9. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah
- Reformasi birokrasi merupakan konsep perbaikan birokrasi dengan lingkup yang luas mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural dan etika birokrasi. Perbaikan bukan hanya mencakup aspek sistem birokrasi tetapi juga meliputi budaya kerja dan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi birokrasi ini juga harus disertai dengan tata kelola pemerintah yang perupa:
-) Perbaikan Pelayanan public, peningkatan profesionalisme aparatur daerah dan peningkatan sarana dan prasarana pemerintah
 -) Pengelolaan sumberdaya keuangan dan Aset daerah yang efisien, akuntabel dan transparan
 -) Sistem tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat reformasi birokrasi
10. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana
- Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana menjadi penting terkait dengan ketidakseimbangan lingkungan hidup yang disebabkan adanya eksploitasi terhadap sumber daya alam, pengrusakan hutan, polusi yang akibatnya akan

menyebabkan terjadinya bencana. Adapun yang menjadi isu pokok yang perlu diperhatikan adalah:

-) Ruang terbuka hijau : hutan kota dan taman kota
-) Perubahan iklim lokal dan global
-) Bencana alam
-) Konservasi sumber daya alam
-) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

11. Pariwisata, pelestarian dan pengembangan seni budaya

Kabupaten Bima memiliki obyek wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan, baik wisata budaya maupun wisata alam.

Pengembangan pariwisata, pelestarian dan pengembangan budaya ini diharapkan dapat memacu pembangunan wilayah Kabupaten Bima. Untuk mengembangkan pariwisata, pelestarian dan pengembangan seni budaya ini maka perlu dilakukan:

-) Destinasi wisata: lokal etnik
-) Pendataan dan Promosi pariwisata, seni dan budaya
-) Peningkatan sarana dan prasarana seni budaya: gedung kesenian dan kebudayaan.